BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Kelistrikan di Indonesia dimulai sejak abad ke 20 terutama digunakan untuk penerangan sebagai pengganti lampu minyak. Pada saat itu penguasaan dan pengusaha kelistrikan dipegang dan diselenggarakan secara monopoli oleh perusahaan Belanda seperti :

1. Di Jakarta, dipegang oleh OGEM (*OverZeese Gemeenschoppelijke Electriciteit).*
2. Di Jawa Barat (Bandung), dipegang oleh GEEBO *(Gemeenschoppelijke Electriciteit Bedrijt Voor Bandoeng En Omstreken).*
3. Di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, dipegang oleh ANIEM *(Algemene Nederlansche Indische Electriciteit Maatschappij).*

Perkembangan kelistrikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1905

Pada tahun 1905 yaitu ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda, pemerintah Hindia Belanda memberikan ijin kepada BEM (*Bandoengsche Electricitiet Maatschappij)* untuk mendirikan perusahaan listrik di Bandung dengan tujuan membangun jaringan-jaringan di Bandung dan sekitarnya.

Pada tahun 1916 berdiri LWB (*Land Waterkracht Bedrijt)* yang bergerak dibidang usaha penyaluran dan pembangkitan tenaga listrik yang mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1919 dibuat akte pendirian perusahaan kelistrikan dihadapan notaris Mr. Adrian Hendrik Van Ophusein di Batavia dengan No. 213 tanggal 31 Desember 1919. Kemudian BEM dihapus dan diganti menjadi GEBEO.

Pada tanggal 1 Januari 1921 di Bandung berdiri GEBEO NV yang tugasnya melaksanakan pengusahaan distribusi tenaga listrik di Jawa Barat, kecuali di Cirebon, Tangerang dan Jakarta.

2. Masa Pemerintahan Jepang Tahun 1945

Pada masa pemerintahan Jepang, pendistribusian tenaga listrik diusahakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha. Sedangkan pembangkitan dan penyalurannya dilakukan oleh dua instansi yaitu Seiboe – Denki Djigyo Sha dan Denki Kosha dengan wilayah kerja di seluruh Jawa.

3. Masa Perjuangan Fisik setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945- 1949.

Pada masa revolusi perjuangan fisik, kelistrikan di Indonesia khususnya di Jawa Barat dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan nama Djawatan Listrik

.

4. Masa Agresi Belanda

Pada tahun 1948 Belanda masuk ke Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia Hijrah ke Jogyakarta, sehingga pengusahaan dan pendistribusian tenaga listrik khususnya di Jawa Barat dan Jakarta diusahakan kembali oleh GEBEO, sedangkan pembangkitan dan penyalurannya tetap dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu oleh PENUPETEL (Perusahaan Negara Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik).

5. Masa Nasionalisme sampai sekarang

Tahun 1957 merupakan titik tolak atau awalnya pengelolaan dan pengusahaan kelistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, karena pada tahun tersebut dimulai adanya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1957, GEBEO NV diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dikukuhkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 1985 JO dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1959 tentang pembentukan perusahaan listrik dan gas milik Belanda, berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, GEBEO NV di Bandung dinyatakan menjadi Perusahaan Negara dengan nama Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1961 dibentuk BPUPLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Pendirian ini didasarkan pada UU No. 19 Tahun 1960 tentang pendirian BPUPLN pada surat tanggal 1 Januari 1961. Susunan organisasi

BPUPLN ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja No. Menteri 16 /1/20 tanggal 20 Mei 1961, bahwa BPUPLN terdiri atas 14 Exploitasi, yaitu :

a. Exploitasi I sampai X, menguasai, mengelola pembangkitan dan pendistribusian listrik di wilayah Jawa Barat.
b. Eksplotasi XI sampai XII, menguasai dan mengelola pendistribusian listrik di wilayah Jawa Barat .
c. Eksploitasi XIII, menguasai dan mengelola pembangkitan dan pendistribusian listrik di wilayah Jawa Barat melalui sektor-sektor Jakarta, Bogor, Bandung, dan Cirebon.
d. Eksploitasi XIV, menguasai dan mengelola Perusahaan Gas di seluruh Indonesia.

Oleh karena BPUPLN mencakup Perusahaan Gas, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja No. 9/PRT/1964 tanggal 28 Desember 1964, BPUPLN mendirikan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang masing-masing direksinya terpisah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 tentang pembubaran Perusahaan Umum Listrik Negara, pembentukan Perusahaan Listrik Negara dan Gas Negara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja No. I/PRT/1965 tanggal 21 Januari 1965, diadakan reorganisasi BPUPLN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972 tentang PLN, UU No. 19 Tahun 1960 ditegaskan statusnya menjadi PERUM dan dirubah anggaran

dasarnya khususnya yang mengenai status hak dan wewenang serta tanggung jawab.

Perusahaan Umum Listrik Negara pembangkit wilayah Eksploitasi di Jawa Barat disebut PLN Eksploitasi XI, yang berkedudukan di Bandung dan mempunyai wilayah kerja di Jawa Barat kecuali Tanggerang, Jakarta, Bogor, Sukabumi dan Banten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tenaga Kerja No.013 /PRT/1975 tanggal 8 September 1975 tentang organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah.

Berdasarkan pengumuman NO.05/D-III/SEK/1975 tanggal 14 Juni 1975, maka Perusahaan Umum Listrik Negara Eksploitasi X dirubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi III yang diberi tugas khusus melaksanakan dan mengusahakan distribusi tenaga listrik langsung kepada para konsumen. Kemudian Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi III dirubah lagi menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat dengan wilayah kerja di Jawa Barat kecuali Jakarta dan Tangerang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, maka Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972 dinyatakan masih tetap berlaku hanya saja didalamnya terdapat beberapa pasal yang dirubah dan disesuaikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tanggal 16 juni 1994 maka Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat statusnya berubah menjadi

Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat tanggal 30 Juli 1994 sesuai dengan akte pendirian.

Saat ini PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat mempunyai satu bengkel Distribusi, 1 unit pengatur Distribusi (UPD), 1 kantor Distribusi dan 15 kantor Cabang yaitu sebagai berikut:

1. Cabang Cirebon
2. Cabang Tasikmalaya
3. Cabang Garut
4. Cabang Sukabumi
5. Cabang Cianjur
6. Cabang Bogor
7. Cabang Banten
8. Cabang Purwakarta
9. Cabang Cimahi
10. Cabang Bandung
11. Cabang Majalaya
12. Cabang Bekasi
13. Cabang Depok
14. Cabang Karawang
15. Cabang Sumedang

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Perusahaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung ini merupakan suatu organisasi karena didalamnya terdiri atas orang-orang yang melaksanakan kegiatan administrasi dan manajemen agar organisasi itu dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan manusia untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerja sama diantara orang-orang dalam suatu organisasi sangatlah penting hal ini dikarenakan tenaga perorangan terbatas kemampuannya.

Adapun struktur organisasi dilampirkan dalam laporan ini PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat berdiri dan menjadi badan usaha sejak anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Kehakiman yaitu tanggal 1 Agustus 1994.

2.3. Deskripsi Jabatan Uraian Tugas

Struktur organisasi PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat cabang Bandung yang berkedudukan di Jl.Soekarno-Hatta no.436 Bandung, secara umum dapat digambarkan atau deskripsi jabatannya sebagai berikut :

1. Bagian Kontruksi

   Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga kerja dan bangunan sipil yang terkait dengan pembangkitan dan pendistribusian tenaga listrik.

   a. Seksi Perencanaan Kontruksi

      Melaksanakan perencanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait.

b. Seksi Pengendalian Kontruksi

Melakukan pengendaliaan dan penguasaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait.

c. Seksi Administrasi Teknik

Melaksanakan kegiatan administrasi teknik kontruksi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait.

2. Bagian Distribusi

Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.

a. Seksi Perencanaan Distribusi

Melaksanakan perencanaan sistem pendistribusian tenaga listrik dan kebutuhan material untuk pengoperasian serta pemeliharaan sarana pendistribusian.

b. Seksi Operasi Distribusi

Melaksanakan pengoperasian distribusi tenaga listrik dan penerbitan penggunaan jaringan listrik pada pelanggan.

c. Seksi Pemeliharaan Distribusi

Merencanakan dan mengevaluasi pengembangan, pengusahaan listrik pedesaan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan dan pengusahaannya.

3. Bagian Pelayanan Pelanggan

Melaksanakan penjualan tenaga listrik dan administrasi pelanggan tenaga listrik

a. Seksi Kepegawaian

Melaksanakan kegiatan pengurusan Sumber Daya Manusia.

b. Seksi Anggaran dan Keuangan

Melaksanakan penyusunan anggaran belanja dan pendapatan serta membantu pelaksanaannya .

c. Seksi Akuntansi

Melaksanakan kegiatan pencatatan transaksi, aktiva tetap, pekerjaan, dalam pelaksanaan serta persediaan barang.

d. Seksi Perbekalan

Melaksanakan pengadaan dan penyimpanan barang material, alat tulis kantor dan administrasi pelanggan.

e. Seksi Sekretariat dan Umum

Melaksanakan tata usaha kesektariatan dan penyusunan rumah tangga serta keamanan lingkungan kerja.

2.4. Aktivitas Perusahaan

Dalam menjalankan tugasnya PT.PLN(Persero) sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang ketenaga listrikan mempunyai visi, misi serta maksud dan tujuan yang berguna untuk mencapai segala kemajuan yang diharapkan.

* **Visi PT.PLN (Persero)**

1. Maju

   Dengan pengertian harus mempunyai wawasan bisnis yang mencerminkan unsur-unsur kompetitif, efisien, dan produktif.

2. Modern

   Memanfaatkan teknologi maju untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja.

3. Mandiri

   Mampu menentukan arah dan kebijakan untuk melaksanakan misi yang diembannya.

* **Misi PT.PLN (Persero)**

1. Fungsi bisnis/memupuk keuntungan

   Sebagai badan usaha kegiatan usaha berdasarkan kaidah bisnis yang sehat guna menjamin keberadaan dan pengembangannya dalam jangka panjang.

2. Fungsi sosial /agen pembangunan

   Sebagai pelaksanaan pembangunan yang melakukan kegiatan baik yang bersifat program pembangunan sebagaimana layaknya maupun bersifat sosial dan perintis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sekalipun kegiatan tersebut tidak mendatangkan keuntungan.

* **Maksud dan tujuan PT.PLN (Persero)**

Maksud dan tujuan PT.PLN (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dengan jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
   a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
   b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.